



Jurnal Agama dan Masyarakat SOSIOLOGIA

Tren dan Tantangan Kebijakan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi di Indonesia: Kajian Literatur Sosiologi Agama

Andi Muhammad Ikbal Salam¹, Budi Prayetno² Usri³, Muhammad Syihabbuddin Taufiq⁴

¹Univeristas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

²Univeristas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

³Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia

⁴Univeristas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

Corresponding Author: Andi Muhammad Ikbal Salam, a.mikbalsalam@unsulbar.ac.id

Submitted: 17 Oktober 2024 / Accepted: 28 November 2024 / Published: 30 November 2024

DOI : <https://doi.org/10.35905/sosiologia.v3i1.10895>

ABSTRACT

This research discusses the Indonesian government's policy of strengthening character and anti-corruption education at all levels of education. The aim is to form a generation with strong morality and a deep understanding of integrity. This research uses a systematic literature review method to analyse various literature sources related to the policy and its implementation. The approaches found include the development of formal and non-formal education programmes, as well as public campaigns. The results show an increasing attention to this issue in the national curriculum. However, challenges such as limited resources, stakeholder resistance, and lack of standardised teaching methodologies still exist. The role of teachers and educational institutions also needs to be improved through continuous coaching and training. Government policy support appears to be increasing, but implementation in schools requires a comprehensive and collaborative approach. It is recommended to develop a more contextualised curriculum and strengthen cooperation between the government, schools and communities to create an educational environment that strengthens character and anti-corruption values in a sustainable manner.

KEYWORDS

Character Education; Anti Corruption; Education Policy

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memperkuat pendidikan karakter dan anti-korupsi di semua tingkatan pendidikan. Tujuannya adalah membentuk generasi dengan moralitas kuat dan pemahaman mendalam tentang integritas. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review untuk menganalisis berbagai sumber literatur terkait kebijakan dan implementasinya. Pendekatan yang ditemukan meliputi pengembangan program pendidikan formal dan non-formal, serta kampanye publik. Hasilnya mejukkan peningkatan perhatian terhadap isu ini dalam kurikulum nasional. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi pemangku kepentingan, dan kurangnya metodologi pengajaran standar masih ada. Peran guru dan lembaga pendidikan juga perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan pelatihan berkelanjutan. Dukungan kebijakan pemerintah terlihat meningkat, namun pelaksanaan di sekolah membutuhkan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Disarankan pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual dan penguatan kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memperkuat nilai-nilai karakter dan anti korupsi secara berkelanjutan.

KATA KUNCI

Pendidikan Karakter; Anti Korupsi ; Kebijakan Pendidikan



@2024 The Author(s). Published by State Islamic University of Parepare. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini berada dalam masa transisi menuju puncak peradaban dunia, di mana pendidikan karakter menjadi semakin penting. Hanya bangsa dengan karakter kuat yang mampu menghadapi berbagai tantangan global, termasuk mencegah korupsi yang telah mengakar dalam masyarakat¹. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter dan anti-korupsi di semua tingkatan pendidikan, termasuk memasukkan pendidikan anti-korupsi sebagai bagian dari kurikulum formal. Misalnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan pentingnya pendidikan yang berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter bangsa yang bermartabat. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan Pendidikan Karakter mendukung integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam proses pembelajaran. Pendidikan anti-korupsi sejak dini menjadi penting karena masa kanak-kanak adalah fase pembentukan nilai-nilai moral dasar yang akan memengaruhi sikap dan perilaku individu sepanjang hidup. Dengan menanamkan kesadaran dan nilai kejujuran sejak dini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki integritas dan mampu menolak segala bentuk korupsi. Melalui pendidikan karakter yang terintegrasi dengan pendidikan anti-korupsi, generasi muda tidak hanya diharapkan mampu mengembangkan pola pikir kritis dan etika yang kuat, tetapi juga memahami pentingnya kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti-korupsi sejak dini sangatlah mendesak, mengingat anak-anak berada dalam fase pembentukan nilai-nilai dasar yang akan memengaruhi perilaku mereka di masa depan. Dengan menanamkan kesadaran akan dampak negatif korupsi sejak usia dini, diharapkan mereka dapat menjadi individu yang mampu membedakan antara perilaku yang benar dan korupsi, serta berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari praktik korupsi.

Adapun Pendidikan anti-korupsi merupakan pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik². Ini menjadi krusial mengingat korupsi telah menjadi kebiasaan yang mengakar di masyarakat, yang dapat membuat generasi muda melihatnya sebagai sesuatu yang biasa. Sejalan dengan upaya tersebut, pendidikan anti-korupsi memainkan peran vital dalam membentuk mental dan moral generasi penerus, agar terbebas dari pemikiran permisif yang menganggap korupsi sebagai hal lumrah.

Meskipun perhatian pemerintah terhadap pendidikan karakter bukanlah hal baru, upaya untuk menempatkannya pada proporsi yang tepat masih terus berlanjut. Tujuannya adalah membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dan berpengetahuan, tetapi juga bermoral dan berkarakter baik, terutama dengan karakter anti-korupsi.³ Untuk mencapai hasil yang diinginkan, diperlukan sinergi antara semua pemangku kepentingan dalam menghadapi kendala yang ada agar kebijakan pendidikan karakter benar-benar efektif dan berkelanjutan. Dukungan dari komunitas, institusi pendidikan, dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan karakter yang kuat dan berintegritas.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan. Pembangunan karakter memerlukan konsistensi, pendekatan yang menyeluruh, dan waktu yang cukup lama. Berbagai kebijakan dan implementasi dari pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di satuan pendidikan, masih belum sepenuhnya mencapai tujuan pembentukan karakter yang diharapkan⁴.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan ini adalah memastikan bahwa seluruh elemen pendidikan, termasuk kurikulum, pelatihan guru, dan evaluasi pembelajaran, sejalan dengan tujuan pembentukan karakter yang diharapkan. Keterlibatan guru sebagai agen perubahan sangat krusial, mengingat mereka adalah garda terdepan dalam membentuk dan mengarahkan perilaku serta pola pikir siswa. Oleh

¹ Laurensius Laka et al., *Pendidikan Karakter Gen Z Di Era Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

² Hilmi Tamela Putri et al., "Persepsi Mahasiswa Prodi PPKn Terhadap Pendidikan Anti-Korupsi Dalam Membentuk Karakter Anti-Korupsi," *Journal of Civic Education* 5, no. 2 (2022): 204–11.

³ Aldi Cahya, "Peranan Pembelajaran Sejarah Sebagai Upaya Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kurikulum Merdeka," *Visi Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2024): 194–205.

⁴ Anisa Amalia Maisaroh and Sri Untari, "Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia Menuju Generasi Emas 2045," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2024, 18–30.

karena itu, pelatihan intensif dan penyediaan sumber daya yang memadai bagi guru merupakan komponen penting yang perlu ditingkatkan dalam kebijakan ini.

Selain itu, metode pengajaran yang digunakan harus inovatif dan kontekstual, agar materi pendidikan karakter dan anti-korupsi dapat diterima dan diinternalisasi dengan baik oleh para siswa⁵. Pendekatan-pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi, yang pada akhirnya dapat membantu mereka memahami pentingnya integritas dan akibat negatif dari korupsi. Penggunaan teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan platform pendidikan yang interaktif dan menarik bagi generasi muda. Teknologi ini dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pendidikan anti-korupsi melalui pengembangan aplikasi pembelajaran yang berisi simulasi kasus korupsi, permainan edukatif, dan modul interaktif yang mengajarkan nilai-nilai integritas. Sebagai contoh, aplikasi seperti Anti-Corruption Adventure atau game berbasis pembelajaran lainnya dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sambil memperkenalkan konsekuensi buruk dari korupsi. Selain itu, media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan kampanye edukasi anti-korupsi melalui video pendek, infografis, atau tantangan kreatif yang relevan dengan kehidupan sehari-hari generasi muda. Dengan cara ini, teknologi digital dapat membuat pendidikan anti-korupsi lebih inklusif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan era digital.

Lebih jauh lagi, keterlibatan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan ini tidak boleh diabaikan. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan dukungan moral dan sosial yang diperlukan untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi pendidikan karakter. Kampanye peningkatan kesadaran dan kolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dapat menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa nilai-nilai anti-korupsi tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penguatan sinergi antara semua pihak terkait dapat menjadi kunci sukses dalam memastikan efektivitas kebijakan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pembentukan karakter dan pencegahan korupsi melalui pendidikan. Dengan menggunakan metode *systematic literature review*, penelitian ini akan mengidentifikasi strategi-strategi implementasi pendidikan anti-korupsi, peran guru dan metode pengajaran yang efektif, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan anti-korupsi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan pendidikan karakter dan anti-korupsi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa depan. Hal ini sangat penting mengingat pendidikan karakter dan anti-korupsi merupakan fondasi dalam membentuk generasi penerus yang kompeten, bermoral tinggi, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berintegritas.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini akan membahas berbagai studi terdahulu yang relevan dengan topik pembentukan karakter dan pencegahan korupsi melalui pendidikan. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek-aspek penting, seperti pendekatan kurikulum yang efektif, peran dan pelatihan guru, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan karakter. Studi-studi ini memberikan landasan teori yang substantif dan membangun kerangka konseptual bagi penelitian ini dengan menyoroti berbagai strategi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan anti-korupsi di berbagai negara dan konteks. Melalui analisis literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memetakan kesenjangan pengetahuan yang masih ada dan memberikan sumbangsih terhadap upaya penyempurnaan kebijakan pendidikan di masa mendatang.

⁵ Abu Dharin, "Pendidikan Karakter Berbasis Komunikasi Edukatif Religius (KER) Di Madrasah Ibtida'iyah" (CV Rizquna, 2021).

Salah satu penelitian penting adalah yang berjudul "Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia Menuju Generasi Emas 2045"⁶. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan penting seperti UU No. 20 Tahun 2003, Perpres No. 87 Tahun 2017, dan Permendikbud Ristek No. 47 Tahun 2023. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, masyarakat, dan pelaku bisnis. Mereka bekerja sama untuk meningkatkan dukungan terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan pemantauan. Dalam hal ini, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab penting untuk mengintegrasikan pembelajaran karakter ke dalam kurikulum, sedangkan pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan pendukung serta dukungan finansial dan infrastruktur.

Penelitian lain yang berjudul "Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar"⁷. Hasilnya menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih terfokus pada pendekatan penindakan yang kurang efektif. Korupsi telah mengakar dalam budaya hukum masyarakat, sehingga langkah-langkah preventif melalui pendidikan antikorupsi di tingkat pendidikan dasar menjadi sangat penting. Pendidikan dasar menjadi titik krusial dalam pembentukan karakter individu, dan pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan sebagai bagian dari pendidikan karakter itu sendiri.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini akan meneliti bagaimana pendidikan antikorupsi dapat diimplementasikan secara efektif. Melalui pendekatan kajian pustaka, penelitian ini akan menganalisis kebijakan pemerintah terkait pendidikan karakter dan antikorupsi, serta mengevaluasi strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai antikorupsi di kalangan siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi sebagai langkah preventif yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi: Studi Deskriptif di Universitas Islam 45 Bekasi"⁸ menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi di universitas merupakan langkah vital dalam membentuk mahasiswa yang berintegritas. Penelitian tersebut menggarisbawahi peran penting tenaga pendidik dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, sementara mahasiswa berperan aktif dengan mengadopsi prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi melalui partisipasi dalam forum keterbukaan dan kampanye di media sosial. Keterlibatan aktif mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus, berkontribusi pada terbentuknya budaya anti korupsi yang kuat dan menciptakan pola pikir, sikap, dan perilaku yang mendukung pemberantasan korupsi di masa depan.

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mendalami lebih lanjut bagaimana kebijakan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi dapat diterapkan di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia, termasuk di pendidikan tinggi. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi implementasi yang efektif, peran pemangku kepentingan dalam mendukung pendidikan anti korupsi, dan dampak dari keterlibatan mahasiswa dalam proses ini.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review*⁹ untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses penelitian dimulai dengan menentukan kata kunci yang spesifik untuk pencarian literatur, yang mencakup istilah terkait pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi, dan kebijakan

⁶Maisaroh and Untari, "Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia Menuju Generasi Emas 2045."

⁷Gregorius Widiartana and Vincentius Patria Setyawan, "Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 2 (2020): 173.

⁸Siti Fadilahtul Hidayah and Aos Kuswandi, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Studi Deskriptif Di Universitas Islam 45 Bekasi," *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 36–48.

⁹Hayrol Azril Mohamed Shaffril, Samsul Farid Samsuddin, and Asnarulkhadi Abu Samah, "The ABC of Systematic Literature Review: The Basic Methodological Guidance for Beginners," *Quality & Quantity* 55 (2021): 1319–46.

pemerintah. Setelah itu, peneliti melakukan pencarian literatur di berbagai database akademik dan perpustakaan untuk mengumpulkan artikel, buku, publikasi, dan dokumen penting lainnya.

Setiap sumber yang ditemukan dievaluasi berdasarkan kriteria seleksi yang telah ditetapkan, seperti relevansi, kualitas, dan kredibilitas. Data yang diperoleh dari literatur terpilih kemudian dianalisis melalui teknik analisis tematik. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur, seperti strategi implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan peran pemangku kepentingan. Tema-tema ini disusun secara sistematis untuk menemukan pola, tren, serta hubungan yang signifikan. Peneliti juga membandingkan temuan dari berbagai literatur untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dan implementasinya di lapangan. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan dalam kebijakan yang ada, sehingga menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas pendidikan karakter dan anti-korupsi di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih holistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Umum Kebijakan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi

Kebijakan pendidikan karakter di Indonesia bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki nilai-nilai moral, etika, dan karakter yang kuat. Kebijakan ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian dari proses pembelajaran¹⁰. Selain itu, Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter¹¹ juga menjadi landasan formal dalam mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Sementara itu, pendidikan anti korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab di kalangan siswa untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini. Kebijakan pendidikan anti korupsi direspon melalui berbagai program yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, termasuk pelajaran tentang etika, transparansi, dan tata kelola yang baik.

Oleh karena itu, desain pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) berbasis anti-korupsi di sekolah menengah pertama tidak hanya penting sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai implementasi nyata dari pendidikan karakter, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab di kalangan siswa. Desain pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) berbasis anti-korupsi di sekolah menengah pertama, yang sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi sebagai bagian integral dari pendidikan karakter.¹² Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab di kalangan siswa, pendidikan PAI ini berfungsi untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan kompetensi pembelajaran anti-korupsi dirumuskan berdasarkan nilai-nilai tersebut dan diterapkan melalui metode yang kontekstual, interaktif, dan integratif. Kebijakan pendidikan anti-korupsi ini diperkuat dengan program-program di sekolah yang mencakup pelajaran tentang etika dan transparansi, sehingga meningkatkan pemahaman siswa dan membentuk sikap yang dapat dipercaya yang diperlukan untuk menciptakan generasi yang berintegritas.

Pemerintah Indonesia memulai pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan dengan memasukkan ke dalam kurikulum dengan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini berupaya untuk merubah pandangan masyarakat terkait korupsi, yang sering kali dianggap sebagai hal yang biasa, melalui penyuluhan, pembelajaran interaktif, dan diskusi di kelas dengan

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, "Sistem Pendidikan Nasional," Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 20 (2003).

¹¹ Presiden Republik Indonesia, "Penguatan Pendidikan Karakter," Pub. L. No. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 (2017).

¹² Nurotun Mumtahanah and Ahmad Suyuthi, "Pendidikan Islam Dan Spirit Antikorupsi; Analisis Desain Pembelajaran PAI Berwawasan Antikorupsi Di Sekolah," *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 4, no. 2 (2021): 197–213.

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki komitmen dan kepedulian untuk mencegah korupsi¹³. Dengan penguatan pendidikan karakter dan anti korupsi, diharapkan Indonesia dapat mencapai visi untuk menghasilkan generasi emas yang berintegritas dan mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa, khususnya menjelang tahun 2045, yang ditargetkan sebagai tahun pencapaian untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi di Indonesia saling terkait dan saling mendukung dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Kebijakan pendidikan karakter sebagai fondasi utama menciptakan individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga sikap dan perilaku yang etis. Pendidikan karakter memberikan kerangka referensi moral yang penting bagi siswa, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial dengan cara yang positif. Di sisi lain, pendidikan anti korupsi berfungsi sebagai instrumen spesifik untuk mencegah dan memerangi praktik korupsi yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Dengan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam pendidikan karakter, siswa tidak hanya belajar mengenai konsekuensi dari korupsi, tetapi juga bagaimana menerapkan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku siswa, menjadikan mereka generasi yang proaktif dalam memerangi korupsi.

Namun, terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesatuan dalam pelaksanaan kurikulum yang mencakup pendidikan karakter dan anti korupsi, yang dapat berujung pada ketidakpuasan di kalangan siswa dan guru. Selain itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan yang bersifat preventif juga perlu diperkuat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pesan-pesan pendidikan karakter dan anti korupsi diterima dan dipahami dengan baik oleh siswa. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan meningkatkan kerjasama antara semua pihak yang terlibat, diharapkan kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi generasi mendatang. Keberhasilan kebijakan ini sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang berintegritas dan bebas dari korupsi, terutama dalam rangka menyongsong Generasi Emas 2045¹⁴.

Tujuan kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi di Indonesia adalah untuk membangun karakter yang kuat pada generasi muda, sehingga mereka dapat bersikap jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas¹⁵. Artinya kebijakan ini bertujuan untuk mencegah korupsi sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa, agar mereka dapat mengenali dan menolak praktik-praktik korupsi serta berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dan transparansi dalam kehidupan. Selain itu, kebijakan ini juga berusaha meningkatkan kesadaran sosial dan moral siswa akan pentingnya etika dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka memahami dampak negatif korupsi terhadap negara dan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini mendorong partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan karakter dan anti korupsi.

Sasaran utama dari kebijakan ini adalah siswa pada semua jenjang pendidikan¹⁶, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, agar nilai-nilai karakter dan anti korupsi tertanam sejak dini dan diperkuat di setiap tahapan pendidikan. Selain itu, para tenaga pendidik juga menjadi sasaran penting, di mana mereka harus dilatih untuk mengajarkan dan mencontohkan nilai-nilai tersebut kepada siswa. Masyarakat dan orang tua juga harus dilibatkan dalam upaya pendidikan ini, sehingga kesadaran akan pentingnya pendidikan

¹³ Ginanjar Hambali, "Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 1 (2020): 31–44.

¹⁴ Maisaroh and Untari, "Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia Menuju Generasi Emas 2045."

¹⁵ Rico Septian Noor, "Pendidikan Karakter Anti Korupsi Sebagai Bagian Dari Upaya Pencegahan Dini Korupsi Di Indonesia," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 55–73.

¹⁶ Ratna Novita Punggeti et al., *Pendidikan Karakter Anti Korupsi* (Basya Media Utama, 2024).

karakter dan anti korupsi dapat ditingkatkan dan mendapatkan dukungan luas. Institusi pendidikan, sebagai pelaksana utama kebijakan, harus berkomitmen untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dan anti korupsi ke dalam kurikulum dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Terakhir, dukungan yang konsisten dari pembuat kebijakan dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang sesuai bagi implementasi kebijakan ini di seluruh tingkat pendidikan, sehingga dapat membentuk generasi yang berintegritas dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

4.2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi di Berbagai Tingkat Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum serta kegiatan pembelajaran yang relevan. Pada tingkat pendidikan dasar, kebijakan ini dilaksanakan melalui pengenalan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Materi pendidikan anti korupsi diajarkan dengan cara yang interaktif, menggunakan cerita, permainan, dan kegiatan kelas untuk mengajak siswa berdiskusi tentang pentingnya integritas dan dampak negatif dari korupsi. Dalam konteks ini, guru berperan penting sebagai teladan dan fasilitator, mendorong siswa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari¹⁷.

Pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), implementasi pendidikan karakter dan anti-korupsi dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Misalnya, guru dapat menggunakan cerita bergambar, lagu-lagu edukatif, atau permainan sederhana yang mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hak orang lain. Selain itu, kegiatan seperti bermain peran (role-playing) untuk mengenali perilaku jujur dan tidak jujur juga efektif membantu anak memahami pentingnya nilai-nilai anti-korupsi sejak dini. Dengan pendekatan yang kreatif dan menyenangkan, pendidikan anti-korupsi di tingkat PAUD dapat membangun fondasi karakter yang kuat pada anak-anak.

Selain itu pendidikan dasar menjadi fondasi krusial dalam membentuk karakter siswa. Melalui pendekatan yang menyenangkan dan menarik, konsep nilai karakter dapat tertanam sejak dini, sehingga siswa diharapkan tumbuh dengan pemahaman yang jelas tentang etika.¹⁸ Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya dan pelatihan untuk guru, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengajaran.

Pada tingkat pendidikan menengah, implementasi kebijakan ini semakin diperkuat dengan pengenalan konsep yang lebih kompleks mengenai etika dan moral.¹⁹ Sekolah menengah dapat mengadakan program literasi anti korupsi melalui seminar, workshop, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mengajarkan siswa tentang transparansi dan akuntabilitas. Melalui diskusi dan proyek penelitian yang membahas isu-isu aktual mengenai korupsi, siswa didorong untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif. Di sini, tantangan muncul dari keberagaman pandangan siswa yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat dalam diskusi. Menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berbagi pandangan mereka adalah penting agar mereka merasa dihargai dan dapat berkontribusi secara aktif. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan anti korupsi di sekolah juga sangat diperlukan agar nilai-nilai ini dapat diteruskan di lingkungan rumah.

Pada tingkat pendidikan tinggi, implementasi kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi lebih ditekankan pada pengembangan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Universitas dapat mengintegrasikan mata kuliah yang fokus pada etika, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pencegahan korupsi ke dalam kurikulum mereka²⁰. Kerjasama dengan lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan

¹⁷Suanto Suanto and Nurdyiana Nurdyiana, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2020): 107–14.

¹⁸Sapto Handoyo DP and Herli Antoni, "Penguatan Karakter Siswa Pada Satuan Pendidikan Di Kota Bogor Melalui Pendidikan Anti Korupsi (Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan)," *Bogor: PALAR (Pakuan Law Review)*, 2021.

¹⁹Mursyidah Dwi Hartati, Rahmad Agung Nugraha, and Suriswo Suriswo, "Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal" (Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

²⁰Efi Miftah Faridli et al., "Membangun Budaya Anti-Korupsi: Implementasi Prinsip-Prinsip Mohammad Hatta Dalam Pembelajaran Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 10, no. 1 (2024): 200–208.

Korupsi (KPK), dalam bentuk program pendidikan, pelatihan, atau magang memberi mahasiswa wawasan langsung tentang tindakan pencegahan korupsi.²¹ Keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial dan advokasi juga mendorong mereka untuk berperan sebagai agen perubahan di masyarakat, mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Meskipun banyak universitas telah berupaya menerapkan mata kuliah ini, tantangan seperti kurangnya minat mahasiswa dan masih adanya stigma negatif terhadap diskusi isu korupsi dapat menghambat implementasi tersebut. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi universitas untuk menciptakan program yang menarik dan relevan, serta memberikan pengalaman praktis yang dapat memotivasi mahasiswa untuk terlibat lebih dalam.

Implementasi kebijakan pendidikan karakter dan anti-korupsi di berbagai tingkat pendidikan, jika ditinjau melalui perspektif sosiologi agama, menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh agama dapat menjadi landasan penting dalam pembentukan karakter individu. Pada tingkat PAUD, pendidikan ini diterapkan melalui permainan edukatif dan cerita moral yang sederhana untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Di tingkat sekolah dasar, nilai-nilai anti-korupsi mulai dikenalkan lebih spesifik melalui kegiatan praktis seperti pengelolaan uang jajan dengan transparan. Pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam kurikulum, termasuk diskusi kritis tentang dampak sosial korupsi, serta studi kasus untuk mengasah kesadaran moral siswa. Sosiologi agama melihat bahwa pembentukan karakter anti-korupsi ini harus diperkuat dengan peran agama yang mengajarkan integritas sebagai kewajiban spiritual dan sosial. Dengan menggabungkan nilai-nilai agama dan kebijakan pendidikan, generasi muda dapat memahami pentingnya anti-korupsi sebagai bagian dari komitmen moral terhadap masyarakat dan tanggung jawab spiritual kepada Tuhan.

Pendekatan yang berjenjang ini, diharapkan implementasi kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi dapat membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki komitmen moral yang tinggi untuk mencegah dan memberantas korupsi di masa depan. Setiap tingkat pendidikan memiliki peran vital dalam membentuk karakter individu yang berintegritas, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada upaya menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi. Secara keseluruhan, kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, orang tua, dan masyarakat, sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

4.3. Peran Pemangku Kepentingan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi

Implementasi kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi di Indonesia melibatkan beragam pemangku kepentingan yang memegang peranan kunci dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang berbeda-beda, yang dapat memastikan keberhasilan dari kebijakan ini.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran sentral dalam merancang kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi.²² Tanggung jawab pemerintah mencakup penyusunan regulasi, alokasi dana, dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga bertugas untuk memastikan ketersediaan pelatihan dan sumber daya bagi para guru, serta memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat. Dukungan pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi kebijakan, sangat penting untuk menjamin bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran yang ditetapkan²³. Namun, tantangan yang sering muncul adalah adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan umpan balik yang efektif untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.

²¹Abdul Karim, "PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4, no. 2 (2023): 25–49.

²²Tatang Sudrajat, "Relasi Aktor, Institusi Dan Lingkungan Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Pendidikan Antikorupsi," *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 9, no. 1 (2021): 55–63.

²³S H I Chairul Lutfi and M H SH, "MENGGAGAS AKSELERASI PERAN KPK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI," n.d.

Sekolah dan universitas berfungsi sebagai pelaksana utama dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi.²⁴ Mereka bertanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan anti korupsi ke dalam kurikulum serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Melalui program-program dan kegiatan yang melibatkan siswa, seperti seminar, lokakarya, dan proyek sosial, lembaga pendidikan dapat mendorong siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun lembaga pendidikan memiliki posisi yang strategis, mereka sering kali menghadapi tantangan dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dan menyediakan pelatihan yang cukup bagi tenaga pendidik. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk memperoleh dukungan dari pemerintah dan masyarakat terkait sumber daya dan pelatihan.

Guru berperan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tanggung jawab mereka adalah mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai karakter serta anti korupsi kepada siswa. Melalui teladan yang baik dan metode pengajaran yang inovatif, guru dapat menanamkan sikap integritas dan etika pada siswa.²⁵ Selain itu, guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan dialogis, di mana siswa merasa nyaman untuk berbagi dan mendiskusikan pandangan mereka terkait isu-isu moral dan etika. Namun, tantangan yang dihadapi oleh guru sering kali berkaitan dengan kurangnya pelatihan dan pengetahuan tentang praktik pendidikan karakter dan anti korupsi yang efektif. Oleh karena itu, penyediaan pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi guru sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar nilai-nilai tersebut.

Keterlibatan orang tua sangat krusial dalam mendukung pendidikan karakter dan anti korupsi. Mereka berperan sebagai teladan di rumah dan memiliki kesempatan untuk mendiskusikan nilai-nilai tersebut dengan anak-anak. Orang tua juga dapat berpartisipasi dalam program-program sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler yang menonjolkan karakter dan integritas. Akan tetapi, seringkali orang tua kurang terlibat karena minimnya informasi atau pemahaman mengenai pentingnya pendidikan karakter. Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu aktif dalam melibatkan orang tua dan memberikan informasi mengenai program-program yang diadakan di sekolah.

Masyarakat juga memiliki peran signifikan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan karakter dan anti korupsi. Komunitas dapat memberikan kontribusi melalui aktivitas sosial, kampanye penyuluhan, dan program-program yang menekankan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Partisipasi masyarakat dalam program pendidikan akan memperkuat pesan yang diajarkan di sekolah dan memberikan dukungan yang diperlukan. Akan tetapi, tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan karakter di tingkatan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif perlu dibangun untuk melibatkan masyarakat dalam pendidikan karakter dan anti korupsi.

Secara keseluruhan, peran pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi sangat penting, dengan masing-masing memiliki tanggung jawab yang saling terkait. Melalui kerjasama yang efektif antara pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat, diharapkan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan sukses dan memberikan dampak positif dalam pembentukan generasi yang berintegritas dan memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada dukungan dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat.

4.4. Tantangan Implementasi kebijakan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi

Implementasi kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut:

Salah satu tantangan terbesar adalah adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik di lapangan. Meskipun kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi telah dirumuskan dengan baik,

²⁴Syifa Siti Aulia et al., "Implementasi Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter Sebagai Wahana Pendidikan Nilai," *Jurnal Pendidikan Karakter* 13, no. 2 (2022): 234–43.

²⁵Muhammad Fahmi, Senata Adi Prasetya, and Zakiyatul Nisa' Syaifuddin, "Quo Vadis Pendidikan Karakter Di Indonesia," *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2021): 23–45.

seringkali implementasinya tidak berjalan sesuai harapan akibat kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan di berbagai daerah dan sekolah. Kesenjangan ini bisa disebabkan oleh perbedaan tingkat pemahaman dan komitmen antara pengurus pendidikan di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan mekanisme evaluasi yang jelas dan terarah untuk memantau implementasi di lapangan.

Banyak tenaga pendidik yang belum memperoleh pelatihan yang cukup terkait dengan pendidikan karakter dan anti korupsi. Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai tersebut dalam pengajaran sehari-hari dapat mengurangi dampak dari kebijakan ini. Tanpa dukungan pelatihan yang memadai, guru mungkin tidak akan mampu mengajarkan dan menerapkan prinsip-prinsip karakter dan anti korupsi secara efektif di kelas.

Keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan anti korupsi, serta resistensi terhadap perubahan budaya yang mendukung integritas²⁶. Terlebih lagi sekolah sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk dana, fasilitas, dan materi pembelajaran yang memadai untuk mendukung pendidikan karakter dan anti korupsi. Keterbatasan ini dapat menghambat pelaksanaan program-program pendidikan yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan integritas. Tanpa dukungan dana dan sumber daya yang cukup, inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Beberapa kasus, masyarakat masih memiliki persepsi yang negatif terhadap pendidikan karakter dan upaya pencegahan korupsi. Dalam budaya di mana korupsi dianggap sebagai hal yang biasa, sulit untuk mengubah pandangan ini dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan kejujuran. Ini menunjukkan perlunya pendidikan dan pemahaman yang lebih luas tentang dampak negatif dari korupsi serta pentingnya karakter yang kuat di kalangan masyarakat.

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter dan anti korupsi sering kali minim. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan karakter membuat orang tua kurang aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah yang mendukung pembentukan karakter anak-anak mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran orang tua mengenai peran mereka dalam pendidikan karakter di rumah agar nilai-nilai tersebut dapat diperkuat di lingkungan keluarga. Lingkungan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi. Di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, mungkin ada tantangan lebih besar dalam menerapkan nilai-nilai tersebut karena masalah lain yang lebih mendesak, seperti kebutuhan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, program-program pendidikan harus mempertimbangkan realitas kehidupan sehari-hari siswa dan keluarga mereka, serta memberikan dukungan yang relevan.

Pemimpin agama yang berperan penting dalam membimbing masyarakat,²⁷ pemimpin atau tokoh masyarakat lainnya juga memiliki tanggung jawab dalam konteks pendidikan karakter dan anti korupsi. Lingkungan sosial dan ekonomi yang beragam, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, dapat mempengaruhi efektivitas program pendidikan yang dirancang. Tantangan lebih besar muncul ketika nilai-nilai karakter dan anti korupsi harus bersaing dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Oleh karena itu, penting bagi program-program pendidikan untuk tidak hanya menanamkan nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga mempertimbangkan realitas sehari-hari siswa dan keluarga mereka.

Pendekatan yang memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi, serta membuka ruang dialog sebagaimana dilakukan oleh pemimpin agama dalam mendorong moderasi Islam, diharapkan kebijakan pendidikan karakter dan anti korupsi dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Hal ini mencakup penyesuaian strategi pendidikan serta memberikan dukungan relevan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga nilai-nilai karakter dan integritas dapat tertanam dengan baik di kalangan generasi muda meskipun dalam situasi yang penuh tantangan. Menghadapi tantangan dan hambatan ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan

²⁶Nurudin Nurudin, M Asif Nur Fauzi, and Chulil Barory, "Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter Dan Tantangannya," *Educatus* 2, no. 1 (2024): 19–26.

²⁷Muhiddin Bakri, "Peran Tokoh Agama Dalam Menanamkan Moderasi Islam Dimasa Pandemi Covid-19," *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 29–40.

kolaboratif antara semua pemangku kepentingan pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat. Memperkuat kerjasama, memberikan pelatihan yang adekuat, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter dan anti korupsi merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

5. KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan karakter dan anti-korupsi di Indonesia merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berintegritas dan memiliki komitmen untuk mencegah korupsi. Meskipun telah dirumuskan dengan baik dalam berbagai regulasi, implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kesenjangan antara kebijakan dan praktik, keterbatasan sumber daya, serta perlunya keterlibatan yang lebih aktif dari orang tua dan masyarakat. Untuk mengeksplorasi strategi implementasi yang efektif, pendekatan kolaboratif perlu diterapkan, misalnya melalui pengintegrasian nilai-nilai anti-korupsi dalam kegiatan ekstrakurikuler, pengadaan platform digital edukatif, dan pelibatan komunitas dalam pengawasan moral siswa.

Peran pemangku kepentingan seperti pemerintah, guru, orang tua, dan organisasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah harus menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pendidikan karakter dan anti-korupsi serta menyusun kebijakan yang mendorong pelibatan masyarakat dalam mendukung lingkungan belajar yang bebas korupsi. Di sisi lain, mahasiswa juga dapat memainkan peran strategis sebagai agen perubahan melalui keterlibatan aktif dalam kampanye anti-korupsi di lingkungan pendidikan mereka, seperti menginisiasi forum diskusi, proyek sosial, atau kampanye kesadaran publik. Keterlibatan mahasiswa tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu korupsi, tetapi juga membentuk rasa tanggung jawab kolektif untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang lebih kuat. Dengan demikian, kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

6. REFERENSI

- [1.] Aulia, Syifa Siti, B Arif, Rosidah Amalia, Nurul Hidayati, and R A Yudha. "Implementasi Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter Sebagai Wahana Pendidikan Nilai." *Jurnal Pendidikan Karakter* 13, no. 2 (2022): 234–43.
- [2.] Bakri, Muhibbin. "Peran Tokoh Agama Dalam Menanamkan Moderasi Islam Dimasa Pandemi Covid-19." *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 29–40.
- [3.] Cahya, Aldi. "Peranan Pembelajaran Sejarah Sebagai Upaya Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kurikulum Merdeka." *Visi Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2024): 194–205.
- [4.] Chairul Lutfi, S H I, and M H SH. "Menggagas Akselerasi Peran KPK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi," n.d.
- [5.] Dharin, Abu. "Pendidikan Karakter Berbasis Komunikasi Edukatif Religius (KER) Di Madrasah Ibtida'iyah." CV Rizquna, 2021.
- [6.] DP, Sapto Handoyo, and Herli Antoni. "Penguatan Karakter Siswa Pada Satuan Pendidikan Di Kota Bogor Melalui Pendidikan Anti Korupsi (Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan)." *Bogor: PALAR (Pakuan Law Review)*, 2021.
- [7.] Dwi Hartati, Mursyidah, Rahmad Agung Nugraha, and Suriswo Suriswo. "Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal." Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- [8.] Fahmi, Muhammad, Senata Adi Prasetya, and Zakiyatul Nisa' Syaifuddin. "Quo Vadis Pendidikan Karakter Di Indonesia." *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2021): 23–45.
- [9.] Faridli, Efi Miftah, Harsono Harsono, Endang Fauziati, and Muhammad Musiyam. "Membangun Budaya Anti-Korupsi: Implementasi Prinsip-Prinsip Mohammad Hatta Dalam Pembelajaran Di Universitas

Muhammadiyah Purwokerto." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 10, no. 1 (2024): 200–208.

[10.] Hambali, Ginanjar. "Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 1 (2020): 31–44.

[11.] Hidayah, Siti Fadilahtul, and Aos Kuswandi. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Studi Deskriftif Di Universitas Islam 45 Bekasi." *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 36–48.

[12.] Karim, Abdul. "Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Korupsi Melaui Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4, no. 2 (2023): 25–49.

[13.] Laka, Laurensius, Rafik Darmansyah, Loso Judijanto, Justin Foera-era Lase, Farid Haluti, Febti Kuswanti, and Kalip Kalip. *Pendidikan Karakter Gen Z Di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

[14.] Maisaroh, Anisa Amalia, and Sri Untari. "Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia Menuju Generasi Emas 2045." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2024, 18–30.

[15.] Mohamed Shaffril, Hayrol Azril, Samsul Farid Samsuddin, and Asnarulkhadi Abu Samah. "The ABC of Systematic Literature Review: The Basic Methodological Guidance for Beginners." *Quality & Quantity* 55 (2021): 1319–46.

[16.] Mumtahanah, Nurotun, and Ahmad Suyuthi. "Pendidikan Islam Dan Spirit Antikorupsi; Analisis Desain Pembelajaran PAI Berwawasan Antikorupsi Di Sekolah." *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 4, no. 2 (2021): 197–213.

[17.] Noor, Rico Septian. "Pendidikan Karakter Anti Korupsi Sebagai Bagian Dari Upaya Pencegahan Dini Korupsi Di Indonesia." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 55–73.

[18.] Nurudin, Nurudin, M Asif Nur Fauzi, and Chulil Barory. "Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter Dan Tantangannya." *Educatus* 2, no. 1 (2024): 19–26.

[19.] Presiden Republik Indonesia. Penguatan Pendidikan Karakter, Pub. L. No. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang (2017).

[20.] ———. Sistemn Pendidikan Nasional, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 20 (2003).

[21.] Punggeti, Ratna Novita, Miptah Parid, Dasep Supriatna, Jakarta Umro, M Pd, M Pd Jaenullah, Moh Yasin, and Mas Fierna Janvierna Lusie Putri. *Pendidikan Karakter Anti Korupsi*. Basya Media Utama, 2024.

[22.] Putri, Hilmi Tamela, Suryanef Suryanef, Maria Montessori, and Muhammad Prima Ersya. "Persepsi Mahasiswa Prodi PPKn Terhadap Pendidikan Anti-Korupsi Dalam Membentuk Karakter Anti-Korupsi." *Journal of Civic Education* 5, no. 2 (2022): 204–11.

[23.] Suanto, Suanto, and Nurdyiana Nurdyiana. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2020): 107–14.

[24.] Sudrajat, Tatang. "Relasi Aktor, Institusi Dan Lingkungan Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Pendidikan Antikorupsi." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 9, no. 1 (2021): 55–63.

[25.] Widiartana, Gregorius, and Vincentius Patria Setyawan. "Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 2 (2020): 173.